

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Oktober 2005 mengeluarkan sebuah kebijakan yang “tidak populer” dengan melakukan pengurangan subsidi BBM atau dengan istilah lain, menaikkan harga BBM dengan persentase kenaikan sebesar 80%-185,7%. Ini merupakan kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya di tahun 2005 yang dikeluarkan Pemerintah SBY setelah sebelumnya, 1 Maret 2005 juga telah diberlakukan kenaikan harga BBM sebesar 29%.

Kenaikan harga BBM menurut studi LPEM FE UI, akan berpotensi meningkatkan persentase penduduk miskin dari 16,25 % menjadi 16,43 % atau 400.000 sampai 500.000 orang secara nasional. Menambah sekitar 50% jumlah penduduk Indonesia di garis kemiskinan.

Kenaikan sebesar 185,7% untuk minyak tanah sangat memberatkan masyarakat Indonesia yang sebagian besar terdiri dari kalangan menengah ke bawah. Sungguh persentase kenaikan yang sangat fantastik. Padahal komposisi masyarakat kita sebagian besar adalah masyarakat menengah ke bawah yang notabene sehari-hari masih menggunakan minyak tanah.

Atas kebijakan pengurangan subsidi (kenaikan harga) BBM yang diambil tersebut, Pemerintahan SBY memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat kategori miskin (menurut data BPS), melalui

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM. PKPS BBM tahun 2005 meliputi empat bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 6,27 trilyun untuk pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun untuk tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan salafiah yang sederajat, dan beasiswa reguler untuk tingkat SMA/SMK/MA serta menjamin siswa miskin tetap sekolah.
2. Bidang Kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp. 3,87 trilyun untuk pemberian pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta (yang ditunjuk) di kelas III dan di Puskesmas.
3. Bidang Infrastruktur Pedesaan dialokasikan dana sebesar Rp 3,34 trilyun yang difokuskan kepada desa tertinggal yang membutuhkan penyediaan, peningkatan dan perbaikan di bidang prasarana jalan dan jembatan pedesaan, prasarana irigasi pedesaan dan prasarana air bersih di pedesaan.
4. Bidang Subsidi Langsung Tunai, dana sebesar Rp. 4,65 trilyun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000/ Rumah Tangga/ bulan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin. Payung hukum SLT adalah Inpres No.12/2005 tentang Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan dan berlaku mulai 10 September 2005.¹

Salah satu bentuk PKPS BBM yang diambil Pemerintahan SBY yang akan dibahas lebih lanjut pada skripsi kali ini adalah program kompensasi pengurangan subsidi berbentuk Subsidi Langsung Tunai (SLT). SLT sebesar Rp.100.000.- per bulan untuk satu KK miskin dengan waktu pemberian 3 bulan sekali. Jadi setiap satu rumah tangga miskin (RTM)berhak mendapatkan Rp.300.000,- per 3bulan.

Kebijakan SLT ini sebenarnya merupakan "utang lama" pemerintah kepada rakyat terkait program kompensasi kenaikan harga BBM 1 Maret 2005 lalu, bukan bagian kenaikan harga BBM 1 Oktober, walau waktu pelaksanaannya bersamaan. SLT maupun program-program kompensasi lain terkait kenaikan harga BBM 1 Maret 2005 lama tertunda karena Pemerintah kesulitan memberi

¹ www.temppointraktif.com. *Mengganggu Implementasi Subsidi Langsung Tunai* Edisi Oktober 2005

data detail calon penerima, sebagaimana diisyaratkan Panitia Anggaran DPR. Yaitu identitas lengkap yang antara lain mencakup nama, alamat lengkap, dan bukti diri calon penerima.

Kenaikan harga BBM dengan persentase yang cukup tinggi mengakibatkan melonjaknya harga-harga barang kebutuhan pokok, serta hampir semua tarif harga karena meningkatnya biaya produksi. Muncul aksi protes dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia yang mayoritas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dengan persentase yang fantastis itu.

Masyarakat di Kulon Progo juga seperti masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia, sangat keberatan dengan pengurangan subsidi (kenaikan harga)BBM, terutama per 1 Oktober 2005 lalu (karena persentase kenaikannya terbesar). Yang paling memberatkan adalah dengan kenaikan BBM, harga-harga melojak dan nelayan pun merugi, karena untuk melaut dibutuhkan dana berlipat untuk bahan bakarnya. Sementara hasil tangkapan yang diperoleh tidak menentu.

Jumlah penduduk Kulon Progo pada tahun 2001-akhir juli 2004 sebanyak 452.812 jiwa, yang setiap tahunnya menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 0,57%.

Untuk meredam aksi penolakan masyarakat atas kebijakan kenaikan harga atau pengurangan subsidi BBM yang dilakukan, tidak lama setelah kebijakan tersebut diumumkan 1 Oktober 2005, masyarakat miskin yang telah di data secara detail oleh Badan Pusat Statistik dapat menikmati dana segar 300ribu untuk jatah per 3bulannya.

Untuk mendapatkan data detail dari calon penerima subsidi kompensasi BBM, Badan Pusat Statistik Kulon Progo telah melaksanakan pendataan rumah tangga miskin (sensus kemiskinan) pada tanggal 15 Agustus- 15 September 2005 (serentak di seluruh Indonesia). Pendataan yang dikemas dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005 (PSE05) bertujuan untuk memperoleh nama dan alamat rumah tangga miskin sebagai sasaran Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM, termasuk SLT.² Hasil pendataan ini juga merupakan data basis kemiskinan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

Pendataan ini seperti yang telah disebutkan di atas, hanya dilakukan dalam waktu satu bulan, yaitu 15 Agustus 2005 hingga 15 September 2005. Sungguh waktu yang sangat singkat, apalagi di dalam pendataan tidak melibatkan pihak Pemerintah Daerah. BPS bekerja bak "*single fighter*". Data penduduk miskin versi BPS dalam program ini tidak sama dengan data penduduk miskin versi departemen pendidikan nasional, BKKBN ataupun departemen kesehatan. Menurut Wapres Jusuf Kalla, digunakan 14 kriteria kemiskinan dalam PSE 05 ini.³ Sehingga jumlah penerima SLT tentu saja tidak sama dengan jumlah penerima beras miskin (raskin) dan jumlah pengakses kartu sehat, karena metode serta kriteria yang digunakan berbeda.

Bupati Kulon Progo H. Toyo S. Dipo seperti yang dilansir sebuah media cetak menyampaikan kekecewaannya karena ada banyak warga atau rumah tangga miskin (RTM) yang tidak mendapatkan SLT, sementara ada pihak yang tergolong

² www.tempointeraktif.com

³ Kedaulatan Rakyat, 15 Oktober 2005.

mampu malah mendapat SLT. Kekecewaan juga disampaikan oleh Kelik Iskandar, anggota Komisi D DPRD Kulon Progo yang sangat menyesalkan ketidakcermatan petugas BPS dalam melakukan pendataan awal terhadap warga miskin, sehingga berdasarkan pengaduan yang masuk dan *checking* lapangan, terlihat bahwa pembagian SLT banyak yang salah sasaran. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kulon Progo, Humas Turmudi SH menyampaikan pesan kepada warga miskin di Kulon Progo yang tidak terdata sebagai penerima SLT, agar tidak menyalahkan pemerintah desa, sebab pendataan dilakukan oleh BPS. Dan bagi warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima SLT diberi kesempatan untuk mengadu ke Posko Layanan Pengaduan di Bappeda.

Pendistribusian SLT yang tidak merata dan salah sasaran ini mengakibatkan terjadinya *konflik vertikal* antara masyarakat Kulon Progo dan pemerintah (BPS), juga timbul *konflik horizontal* di kalangan masyarakat sebagai akibat dari kontroversi kebijakan ini dan ketidakmerataan distribusi SLT tersebut. Ketidakmerataan dan ketidakadilan dirasakan sebagian dari sekelompok masyarakat yang sama-sama miskin, hidup bertetangga, tetapi ironisnya sebagian mendapat SLT, dan sebagian lainnya tidak.

Di kalangan masyarakat miskin, masalah ketidakmerataan dan ketidakadilan disrtibusi SLT bisa menjadi sangat sensitif karena menyangkut uang, yang selama ini mereka peroleh dengan kerja keras, sementara dengan SLT ini mereka tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mendapatkannya. Maka akan menjadi sangat ironis saat sebagian dari masyarakat miskin sedang mengantri SLT di kantir pos untuk kemudian mereka bisa menikmati uang

tersebut, tetapi di waktu yang bersamaan, warga miskin yang lain tetap bekerja keras untuk memperoleh uang demi sesuap nasi untuk keluarganya dan bahkan sibuk memperjuangkan haknya dengan mengadu ke instansi pemerintah terkait.

Bagi kelompok yang tidak menerima SLT ini, mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Dapat kita lihat dengan jelas seberapa besar tuntutan dari masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil atas kebijakan kompensasi tersebut. Sebagai manusia, mereka berhak mengeluarkan aspirasi, respon dan reaksi.

Pembahasan skripsi ini difokuskan pada konflik sebagai akibat tidak meratanya distribusi SLT dana kompensasi BBM di kabupaten Kulonprogo. Hal tersebut yang dijadikan kajian skripsi ini karena menurut penulis, kasus konflik tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah sebagai bahan alternatif untuk menjelaskan fenomena konflik yang diakibatkan tidak meratanya distribusi SLT (dana kompensasi BBM), yang terjadi di Kulon Progo serta bagaimanakah pengelolaan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mengapa dipilih Kulonprogo?. Hal itu disebabkan karena Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang tergolong miskin, Pendapatan Asli Daerah-nya (PAD) paling rendah diantara kabupaten-kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga diharapkan pemilihan obyek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan masyarakatnya sebagai syarat mutlak penerima Subsidi Langsung Tunai. Dengan beberapa pertimbangan ilmiah tersebut yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat hal tersebut sebagai tema skripsi kali ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan panjang lebar diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk konflik dan faktor apakah yang mempengaruhi dalam pendistribusian Subsidi Langsung Tunai (SLT) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005?.
2. Bagaimana strategi resolusi konflik yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo untuk mengelola konflik SLT PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2005?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi di dalam Implementasi program SLT PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo.
2. Untuk mengetahui bentuk konflik apa yang mempengaruhi pendistribusian PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo.
3. Untuk mengetahui sejauhmana resolusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo untuk mengelola konflik yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya konflik akibat ketidakmerataan pendistribusian SLT PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo ini.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran penyelesaian konflik bagi upaya penanganan konflik yang ada agar dalam penyelesaian konflik yang terjadi, dapat diupayakan secara demokratis.
3. Untuk mengetahui sejauhmana langkah-langkah dan atau strategi resolusi konflik seperti apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam mengelola konflik akibat ketidakmerataan pendistribusian SLT PKPS BBM ini.

E. Kerangka Teori

1. Konflik

Menurut Pringgodigdo secara harfiah, Konflik berasal dari bahasa Latin "*conflictus*" yang artinya pertentangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konflik adalah: 1). Percekcokan, perselisihan, pertentangan, 2). Ketegangan/ pertentangan. Pengertian yang tersurat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah pengertian konflik yang bersifat negatif.

Sedangkan menurut Alo Liliweri, konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan), karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.⁴ Bagi mereka yang memandang bahwa dunia ini adalah medan harmoni, maka konflik sosial akan dilihat sebagai

⁴ Alo Liliweri, dalam *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKIS, Yogyakarta 2005, hal 146.

penyakit atau sesuatu yang tidak wajar dan karena itu harus dibasmi. Sebaiknya, bagi pihak yang memandang konflik adalah positif, akan mengatakan bahwa konflik adalah merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang selalu ada di kehidupan masyarakat.

Senada dengan pemahaman diatas, menurut Berghe dalam Soleman B. Taneko, mengungkapkan bahwa konflik mempunyai fungsi-fungsi yang bersifat, yaitu:

- a. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
- b. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
- c. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi

Fungsi komunikasi, individu, dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan cepat.

Diungkapkan oleh Haryanto, bahwa dilihat dari bentuknya, konflik dapat dibagi dalam 2 tipe, yaitu:

- 1) Konflik yang menggunakan kekerasan (*violent*).
Konflik yang menggunakan kekerasan menunjuk kepada digunakannya cara-cara "non konvensional" oleh mereka yang terlihat dalam konflik seperti cara-cara demonstrasi, huru-hara ataupun tindakan kekerasan lainnya yang dipergunakan oleh mereka yang terlibat konflik-konflik dalam upaya memperoleh kemenangan.
- 2) Konflik yang tidak menggunakan kekerasan (*non violent*).
Sedangkan konflik yang tidak menggunakan kekerasan, menunjukkan digunakannya cara-cara konvensional dalam penyelesaiannya.⁵

Tanya Glaser, mengungkapkan bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan alamiah yang dialami manusia, terutama interaksi antara

⁵ Haryanto, *Elit, Massa Dan Konflik*, PAU-Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1994, hal 4

manusia yang dapat dikategorikan konstruktif maupun destruktif.⁶ Yang dimaksud konflik konstruktif adalah konflik yang menghasilkan resolusi positif bagi perubahan atau pembaruan relasi. Para sosiolog membedakan 2 jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam pemunculannya: *Pertama*, konflik yang bersifat destruktif karena dipicu oleh rasa kebencian yang tumbuh dalam tubuh mereka masing-masing yang terlihat konflik (munculnya rasa kebencian itu disebabkan oleh banyak hal diantaranya kecemburuan sosial), *Kedua*, Konflik yang fungsional, yakni konflik yang menghasilkan perubahan/ konsensus baru yang bermuara pada perbaikan (konstruktif).⁷

Lewis A. Cosee mendefinisikan bahwa konflik disebabkan oleh adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Konflik merupakan suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir, dilangsungkan atau dieliminir oleh saingan-saingannya.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, pertentangan atau konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Konflik ini terjadi akibat semakin tajamnya perbedaan yang ada, yang dipicu oleh kesadaran pribadi atau

⁶ Alo Liliweri, *Opcit*, hal 290.

⁷ Lukman Soetrisno dalam *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*, Tajidu Press, Yogyakarta, 2000, hal 14-17.

⁸ Tuhana Taufiq Andrianto dalam *Konflik Maluku*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2000, hal 33.

kelompok terhadap perbedaan, misalnya ciri-ciri badaniah atau emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola dan perilaku dan seterusnya dengan pihak lain.⁹

Sedangkan menurut Albert F. Eldridge, konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk non fisik, bisa pula berkadar indah yang tidak menggunakan kekerasan (*violence*), bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan.¹⁰

Menurut Dadang Juliantara, konflik sosial yakni pertentangan yang terjadi antara: 1). Suatu kelompok masyarakat dan kelompok yang lain atas suatu kelas dalam masyarakat dan kelas yang lain; dan 2). Suatu konflik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan Negara.¹¹ Pada poin pertama, konflik merupakan manifestasi dari perbedaan (dalam banyak kemungkinan) antara satu pihak dengan pihak yang lain, dalam skala yang lebih luas. Sedangkan pada poin kedua, umumnya menunjuk adanya konflik sebagai akibat dari kebijakan negara yang merugikan orang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, kebijakan negara, justru menjadi pemicu bagi suatu ketidakadilan, yang pada gilirannya memungkinkan (memunculkan) konflik.¹²

⁹ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 107.

¹⁰ Salahudin, Setawar, *Suatu Model Resolusi Konflik Masyarakat Adat di Bengkulu*.

¹¹ Dadang Juliantara, *Konflik Dan Demokrasi Kekerasan Dan Konflik, Tantangan Bagi Demokrasi*, Forum LSM DIY, Yogyakarta, 201, hal 164.

¹² *Ibid*, hal 165

Menurut Wahyudi berkaitan dengan pandangan Ritzer tentang faktor-faktor penyebab timbulnya konflik di masyarakat, terutama perbedaan posisi dan wewenang, memuat analisis dari Teori Konflik, sebagai berikut:¹³

- a. Konflik sosial bersumber dari adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata. Rasional pun menyebutkan bahwa tidaklah memungkinkan untuk dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, maka konflik akhirnya menjadi suatu keniscayaan dalam masyarakat.
- b. Konflik juga dapat berasal dari tidak tunduknya individu sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada pada posisi menguasai.
- c. Konflik merupakan fungsi dari adanya pertentangan antara penguasa dan yang dikuasai, dimana penguasa senantiasa ingin mempertahankan "*set of properties*" yang melekat pada kekuasaannya, sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan menggapai perbaikan posisi dirinya.

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan" seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok dan antar kelompok/individu dengan

¹³ Agus Surata dan Tuhana Taufiq Andrianto, dalam *Atasi Konflik Etnis*, Globl Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal 4.

pemerintah.¹⁴ Menurut Eric Hoffer, faktor "keinginan akan perubahan" dan "keinginan mendapat pengganti", merupakan penyebab logis dari konflik politik untuk membedakan dengan konflik sosial.¹⁵ Konflik politik, merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang ada di masyarakat. Konflik politik dapat dikelompokkan ke dalam konflik sosial karena terjadi di anggota masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan sosial yang cukup intensif. Konflik politik berkaitan dengan penguasa politik dengan penguasa politik atau keputusan politik yang dibuatnya. Sementara konflik sosial tidak melibatkan perbedaan pandangan terhadap penguasa dan keputusan politik. Masalah yang dipertentangan adalah masalah sosial yang tidak ada kaitan langsung dengan politik ataupun tidak berdampak terhadapnya. Perbedaan pandangan antar anggota masyarakat tentang masalah sosial-budaya, merupakan sumber konflik sosial. Masalah yang dipertentangkan dalam konflik sosial berada pada tingkatan *societal*, sedangkan konflik politik berada pada tingkatan *political*.¹⁶

2. Konflik Vertikal dan Konflik Horisontal

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik itu mencakup kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Yang dimaksud kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, ras dan majemuk secara

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hal 149

¹⁵ Anas Urbaningrum, dalam *Ranjau-ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 hal 8.

¹⁶ *Ibid* hal 9.

sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti: petani buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.¹⁷

Kemajemukan vertikal, ditandai dengan adanya polarisasi struktur masyarakat menurut tingkat kekayaan, kekuasaan dan pendidikan. Konflik jenis ini (konflik vertical) mampun terjadi tatkala distribusi ketiga sumber tersebut pincang alias tidak adil dan proporsional.¹⁸ Konflik jenis ini merupakan konflik yang terjadi antara elit/ penguasa dengan masyarakat.

Tetapi perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan kemajemukan horisontal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik politik. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini baru menimbulkan konflik, apabila kelompok tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan

¹⁷ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal 115.

¹⁸ Anas Urbaningrum, *op.cit*, hal 11.

itu membuat kondisi yang memadai (*sufficient condition*) untuk menimbulkan konflik.¹⁹

Di Indonesia, dimana masyarakatnya terkomposisikan secara majemuk, potensi konflik yang ada jelaslah besar dan merupakan realitas yang harus disadari. Konflik dengan demikian merupakan potensi yang ada dalam setiap kelompok masyarakat. Konflik antar kelompok/horizontal terjadi, tatkala ada satu sumber yang sama untuk diperebutkan. Konflik ini menjadi penting untuk di perhatikan, mengingat implikasi yang akan ditimbulkan, maupun ke arah disintegrasi sosial serta dikhawatirkan akan menjadi penghambat demokratisasi dan penciptaan keadilan sosial.

3. Tahap-tahap Konflik

Konflik berubah-ubah setiap saat, melalui berbagai tahapan aktivitas, intensitas dan ketegangan yang berbeda. Penahaman konflik sangat penting diketahui agar bisa digunakan untuk mengetahui berbagai dinamika dan kejadian yang terjadi pada masing-masing tahap konflik.

Menurut Louis R. Pondy, terdapat 5 tahap atau tingkatan konflik:²⁰

1. Pertama, konflik laten ditandai oleh tiga hal, yakni:
 - a. Adanya persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas.
 - b. Memperebutkan kendali kekuasaan tatkala orang memandang perlunya untuk mengontrol atau mencegah diri atau kelompoknya untuk dikontrol orang lain.
 - c. Adanya perbedaan-perbedaan tujuan pada sub unit-sub unit organisasi atau kelompok dalam masyarakat.
2. Kedua, konflik yang mulai terasa (*perceive conflict*). Hal ini terjadi tatkala masing-masing pihak secara sadar (*aware*) terlibat pusran konflik. Hal tersebut tidak dialami dalam tahap konflik sebelumnya

¹⁹ Ramlan Surbakti, *opcit*, hal 152.

²⁰ *Op cit*.

3. Ketiga, konflik semakin terasa (*felt conflict*). Konflik jenis ini terjadi tatkala memperoleh tanggapan emosional (*emotional response*) dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Bila fenomena ini tidak teratasi, maka timbulah konflik tahap berikutnya.
4. Keempat, yakni konflik terbuka (*manifest conflict*) yang ciri-cirinya terbentang dari perang mulut hingga kekerasan fisik. Salah satu yang menyebabkan potensi konflik menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor "keinginan akan perubahan" dan "keinginan mendapat pengganti". Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner.
5. Kelima, Konflik aftermath, akhir (sementara) dari sebuah konflik. Sebab bagaimanapun kemungkinan untuk terjadi proses konflik kembali masih terbuka lebar, bila penyesuaian konflik tidak memuaskan.

Sedangkan menurut Simon Fisher, analisis dasar konflik ada lima tahapan. Tahap-tahap ini adalah sebagai berikut:²¹

- a. Prakonflik:
Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum.
- b. Konfrontasi
Pada tahapan ini konflik menjadi semakin terbuka. Terjadi polarisasi di antara para pendukung masing-masing pihak, dan mulai melakukan aksi demonstrasi maupun perilaku konfrontatif lainnya.
- c. Krisis:
Ini merupakan puncak, ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus.
- d. Akibat:
Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan ada penyelesaian.
- e. Pascakonflik:
Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah konflik yang timbul tidak teratasi dengan baik, maka pada tahap ini sering kembali situasinya menjadi tahap prakonflik.

²¹ Simon Fisher, dkk dalam *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta, 2010, hal 19.

Masih menurut Simon Fisher, ada empat tipe atau jenis konflik yang masing-masing memiliki potensi dan tantangan tersendiri:²²

1. Tahap Konflik, dalam kesan umum adalah lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik Laten, sifatnya tersembunyi dan seperti telah disebutkan di atas, perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik Terbuka, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
4. Konflik di Permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Menurut Handoko, T.H. jenis konflik ada lima yaitu:

1. Konflik dalam diri individu

Adalah setiap individu memiliki perbedaan dan keunikan yang tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek jasmani maupun rohani.

2. Konflik antar kelompok

Adalah perbedaan pendapat terhadap suatu hal yang cenderung ingin menguasai dan merasa mempunyai hak yang paling luas.

3. Konflik antara individu dengan kelompok

Adalah adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai serta di terapkan di dalam lingkungannya.

²² *Ibid*, hal 6.

4. Konflik antar kelas-kelas sosial

adalah adanya perbedaan tingkat kedudukan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, baik dari ekonomi, pendidikan, pekerjaan serta sub-sub sistem yang ada di masyarakat yang tidak menjalankan fungsi secara adil dan proposional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.

5. Konflik berskala internasional antar negara

adalah perbedaan aturan atau sistem yang di buat oleh negara yang satu dengan yang lainnya yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara.

4. Resolusi Konflik

Secara umum, menurut Simon Fisher, dalam pengelolaan atau manajemen konflik dikenal beberapa istilah:²³

1. Pencegahan Konflik, bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik.
2. Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan Konflik (manajemen konflik), bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
4. Resolusi Konflik, bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan politik.

²³ *Ibid*, hal 7.

Dari beberapa istilah penyelesaian konflik tersebut, ada dua tema yang paling populer dipakai yaitu manajemen konflik dan resolusi konflik, yang dalam kenyataannya dipakai secara bergantian. Dimana resolusi konflik merupakan salah satu cara dari manajemen konflik itu sendiri.

Resolusi konflik adalah usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.²⁴ Resolusi konflik, di pihak lain, mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai sesuatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.²⁵

Salah satu peran pemerintah adalah melakukan resolusi konflik, seperti yang dikemukakan oleh James E. Anderson yang mengemukakan paling tidak pemerintah pada saat sekarang ini mampu menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁶

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi, untuk aturan main yang jelas bagi sistem perekonomian.
2. Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif, *Publik goods* dan juga pelayanan yang dapat dinikmati oleh semua orang.
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat, untuk menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

²⁴ *Ibid*, hal 8.

²⁵ *Ibid*, hal 9.

²⁶ Josef Riwo Kaho dan Haryanto, *Fungsi-fungsi Pemerintahan*, hal 8-9.

4. Menjaga kompetisi (yang sehat) dalam kegiatan ekonomi bisnis.
5. Menjaga sumber daya alam.
6. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa.
7. Menjaga stabilitas ekonomi.

Resolusi konflik adalah bagaimana konflik bisa diselesaikan dengan langkah yang positif dan produktif, yang dalam hal ini dikembangkan dua gagasan utama yaitu:²⁷

- 1). Resolusi konflik yang bersifat jangka dekat, *ad hoc*, sementara dan langsung. Model ini lebih merupakan jawaban langsung dari konflik yang sudah terlanjur berkembang. Langkah ini tidak lain adalah cara yang kuratif-mengobati ketika masalah sudah terlanjur terbit.
- 2). Berupa resolusi yang bermakna responsif, yakni upaya untuk tidak memberikan kondisi yang memungkinkan konflik berlangsung. Metode kedua ini tentu bersifat jangka panjang; sistematis; tidak langsung dan terorganisir.

Untuk menyelesaikan suatu konflik, ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh:²⁸

1. Pertama, jalan atas, atau jalan formal, dalam menggunakan instrumen hukum yang ada. Masalah diselesaikan secara legal formal. Langkah ini sudah tentu membutuhkan sejumlah syarat: 1). instrumen hukum yang bisa dijadikan alat untuk penyelenggaraan proses penyelesaian,

²⁷ Dadang Juliantara, Forum LSM DIY, Opcit, hal 182.

²⁸ *Ibid*, hal 61.

2). lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas, dan 3). pelaksana (penegak hukum) yang tidak diragukan integritasnya. Disinilah masalah segera timbul, sebab berbagai syarat tersebut masih belum tersedia, sehingga walaupun proses hendak dilakukan, maka bisa dipastikan masih akan tetap menyimpan masalah atau tidak memberikan rasa keadilan.

2. Kedua, jalan bawah, atau jalan informal, dalam arti menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat. Untuk memungkinkan kedua, tentu juga membutuhkan syarat, yakni: a). adanya kesediaan damai dari pihak-pihak yang bertikai, b). adanya otoritas informal yang bisa dijadikan rujukan atau kekuatan untuk "melerai" terhadap pihak-pihak yang berkonflik, dan c). adanya kesediaan berbagai pihak untuk membuka pintu dialog, sehingga dimungkinkan adanya saling pengertian.

Hal ini bisa terjadi, bila; terjadi perubahan atau transformasi, sehingga skema baru dalam relasi dimungkinkan; dan terjadi proses pemberdayaan kelembagaan lokal, sehingga institusi lokal bisa dijadikan sandaran dan wahana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka.

Sementara itu menurut Ziegenhagen, bahwa pemerintah dapat melakukan salah satu dari tiga kebijakan intervensi sebagai upaya pengendalian konflik politik, yaitu:²⁹

²⁹ Ramlan Surbakti, *Op. cit.*, hal 161.

- 1). Kemampuan pelaksanaan secara fisik (*coercive capacity*) dan ancaman penggunaannya.
- 2.). Penggunaan saksi negatif atas salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik.
- 3). Pengurangan atau penghapusan sanksi negatif. Penerapan kebijakan-kebijakan intervensi ini tentu bervariasi sesuai dengan jenis dan intensitas konflik yang dihadapi oleh setiap pemerintah.

Sedangkan menurut Maurice Duverger, berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam integrasi melalui empat cara:³⁰ *Pertama*, merumuskan aturan-aturan prosedur, *kedua*, mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif, *ketiga*, memberikan pendidikan warga negara, dan *keempat*, menggunakan kekuatan dalam menghadapi mereka yang merusak hukum. Cara seperti ini dapat digolongkan sebagai pendekatan koersif, dimana pemerintah menjadi penentu bagi terlaksananya integrasi, namun demikian pendekatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan persuasif, disini pemerintah memposisikan diri sebagai mediator untuk memfasilitasi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan.

³⁰ Maurice Daverger dalam *Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 325.

Konsep penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf meliputi tiga bentuk pengendalian konflik, yang diantaranya:³¹

- 1). Konsiliasi, merupakan bentuk pengendalian konflik yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang kemungkinan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan mengenai persoalan-persoalan yang dipertentangkan.
- 2). Mediasi, merupakan cara dimana kedua belah pihak yang bertentangan secara bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ke tiga yang akan memberikan nasehat-nasehat bagaimana masalah diselesaikan. Tetapi nasehat tersebut tidak bersifat mengikat.
- 3). Arbitrasi merupakan cara pengendalian konflik apabila pihak-pihak yang bertentangan sampai pada kesepakatan untuk menerima hadirnya pihak ke tiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk mengakhiri konflik diantara mereka.

Akhir-akhir ini, istilah resolusi konflik marak digunakan dari pada manajemen konflik. Menurut Morton menguraikan secara lengkap beberapa fokus yang berkaitan dengan resolusi konflik. Menurut Morton, Resolusi Konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Metode resolusi konflik sangat membantu kita untuk mengetahui sifat dan fungsi konflik, membedakan bentuk konflik produktif dengan destruktif, serta mengidentifikasi strategi resolusi konflik.³²

³¹ Haryanto, Elit, *Massa Dan Konflik, Suatu Bahasa Awal*, Pusat Antar Universitas-Studi UGM, 1991 Hal 72-74.

³² Morton Deutsch, *The Resolution Of Conflict New Haven: Yale University Press*, 1973:420,

5. Kebijakan Subsidi Langsung Tunai

Kebijakan berasal dari kata bijak. Menurut Kamus Inggris-Indonesia atau Indonesia-Inggris karangan S. Woyowasito dan W.J.S. Purwodarminto, kata bijak berarti *learned, prudent, experienced*. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awalan "ke" dan akhiran "an" menjadi kata benda "kebijakan". Hal itu berarti bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang *learned* (terpelajar), *prudent* (baik) dan *experienced* (berpengalaman). Dengan demikian kebijakan berarti kata benda yang tetap menjadi tambahan keterangan terhadap suatu kata benda lainnya yang diungkapkan oleh *Bijvoegelijk Naam Word*, Belanda.

Kata kebijakan menurut Woyowasito cs berarti: *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan), *capability* (kecakapan), *insight* (kemampuan untuk memahami sesuatu).³³

Dalam Kamus Indonesia-Jawa terbitan Duta Wacana University Press Yogyakarta tahun 1991, dikemukakan bahwa "bijak" berarti pintar, lantip, gathekan, dan kebijakan berarti kepintaran atau kelantipan yang berarti kata benda yang menunjukkan sifat seseorang atau sesuatu yang dimilikinya.³⁴

Banyak istilah yang sering digunakan untuk menyebut kebijakan. Ada yang menggunakan istilah kebijakan publik (*public policy*) maupun kebijaksanaan negara atau kebijaksanaan pemerintah. David Easton menggunakan istilah *public policy* yang ia artikan sebagai: "*public policy is*

³³ Soenarko S.D, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, hal 35.

³⁴ *Ibid*, hal 36.

the authoritative allocation of values for the whole society".³⁵ Yang kurang lebih artinya adalah "kebijakan public adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat". Menurut pengertian ini, hanya pemerintah yang dapat secara sah melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal pada masyarakat.

Kebijakan dilihat dari segi istilahnya menunjukkan pengertian yang sifatnya tetap, serta melekat pada seseorang yang tidak berubah kecuali karena ada sebab untuk perkembangan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan pengertian yang statis (*static concept*).³⁶

Public policy yang sering diterjemahkan secara bebas sebagai kebijakan publik, dalam khasanah ilmu administrasi publik dimaknai secara beragam. Kebijakan publik diberi definisi "Segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya" (Thomas R. Dye), "Serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dan praktek" (Harold Lasswell), "Tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak" (Austein Ranney).³⁷

Kebijakan publik apapun bentuknya, pada dasarnya adalah proses mengenai serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang di desain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil atau masih direncanakan

³⁵ M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 2003, hal 20.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Edi Wibowo dan . Hessel Nogi S, *Kebijakan Publik pro Civil Society*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004, hal 45.

(imagined).³⁸ Selain itu, kebijakan publik juga memiliki karakter khusus yang diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas (*authority*) dalam suatu sistem politik, yang bisa saja berupa anggota legislatif, eksekutif, hakim ataupun administrator.³⁹

Dan suatu hal yang menjadi catatan, bahwa kebijakan publik pada kenyataannya selalu menjadi subyek yang akan diubah-ubah berdasarkan informasi-informasi yang *up to date* dan lebih baik yang diperoleh berkaitan dengan efek yang timbul di masyarakat dari kebijakan tersebut.

Sedangkan, "Subsidi" merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tunjangan untuk meringankan beban masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subsidi adalah bantuan, dan sebagainya, kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pemerintah).

Menurut Antara News,⁴⁰ Susidi Langsung Tunai (SLT) merupakan salah satu dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak. Untuk program tersebut pemerintah memberikan dana SLT sebesar Rp 100 ribu/ keluarga/ bulan. Dana tersebut telah mulai dibagikan sejak awal Oktober 2005 lalu untuk tiga bulan sekaligus Rp. 100.000,-/ bulan/ rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat konsumsi/ kesejahteraan rumah tangga miskin bila pemerintah menaikkan harga BBM.

Distribusi Subsidi Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM, menurut Inpres N. 12 tahun 2005 adalah proses penyaluran subsidi langsung tunai bersamaam atau setelah kegiatan pencocokan dan

³⁸ *Ibid*, hal 7

³⁹ *Ibid*, hal 8.

⁴⁰ www.antaraneews.com, 13 Desember 2005

penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS Kabupaten/ Kota dari P.T.Pos Indonesia didistribusikan kepada Manteri Statistik untuk kecamatan masing-masing. Selanjutnya Mantri Statistik bersama Tim Pendistribusian di tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan/ desa difasilitasi oleh lurah/ kepada desa. Pembagian KKB dapat dilakukan dengan mengundang warga miskin calon penerima KKB ke kantor kelurahan/ balai desa atau diberikan langsung (*door-to door*) ke rumah warga miskin, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing lingkungan.⁴¹

F. Definisi Konsepsional

Konsep merupakan unsur pokok dalam penelitian, yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Menurut Robert K. Merton, konsep menentukan antara variabel-variabel mana kita ingin menentukan hubungan empiris.⁴²

Berdasarkan landasan teori diatas, maka penulis dapat merumuskan definisi konsep sebagai berikut:

1. Konflik adalah suatu kondisi yang terjadi antar dua atau lebih, dimana terdapat pertentangan, ketidakcocokan, dan perbedaan paham, sikap, nilai dan kebutuhan. Penyebab terjadinya konflik juga sangat bervariasi tergantung ter pada cara individu-individu menafsirkan.

⁴¹ Ibid.

⁴² Robert K. Merton menurut Koentjaraningrat dalam *Tesis Septedy "Resousi Konflik Madura-Dayak"*, Studi Tentang Upaya Pemerintahan Kabupaten Kapuas Dalam Menangani Konflik Madura-Dayak di Kabupaten Kapuas, 2003, hal 6.

Menurut Wexley, K.N. dan Yulk, G.A penyebab timbulnya konflik adalah:

- a. persaingan terhadap sumber-sumber, yaitu adanya tingkat persaingan
- b. problem status, status masyarakat yang berbeda-beda
- c. perbedaan sifat-sifat individu, perbedaan sifat atau budaya
- d. perbedaan pendapat, adanya perbedaan cara penilaian
- e. struktur organisasi, peran masyarakat dan aparat pemerintah

Dalam skripsi ini, konflik terjadi antara warga miskin yang tidak mendapat SLT akibat tidak meratanya distribusi SLT PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo dengan (instansi) pemerintah yang dianggap bertanggungjawab atas kebijakan ini.

2. Resolusi konflik adalah sebuah usaha untuk mengelolah konflik yang ada untuk kemudian diatasi dengan membuat sebuah jalan alternatif yang positif bagi hubungan pihak-pihak yang berkonflik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, yaitu Kepala Daerah/ Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Kebijakan Subsidi Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi adalah kebijakan yang dibuat negara untuk sebagai pengalihan subsidi dari Bahan Bakar Minyak yang dinaikkan pada 1 Oktober 2005, berupa uang tunai Rp. 100.000,- untuk satu bulan, dengan waktu pemberian 3bulan sekali bagi warga miskin yang terdaftar di BPS sebagai penerima SLT.

5. Distribusi Subsidi Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM adalah proses penyaluran subsidi langsung tunai yang dilakukan bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang (verifikasi).

G. Definisi Operasional

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengelola konflik pendistribusian dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2005, dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Konflik dalam pendistribusian SLT PKPS BBM diukur dengan indikator-indikator:
 - a. Adanya bentuk-bentuk konflik berupa: protes, perlawanan dan penolakan masyarakat atas ketidakadilan dalam pendistribusian SLT yang ditujukan kepada instansi di daerah yang terkait dengan kebijakan SLT.
 - b. Adanya penyebab konflik yang berupa ketidakpuasan masyarakat atas sistem yang digunakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat pembagian dana SLT.
2. Strategi resolusi konflik, diukur dengan indikator:
 - a. Upaya dari pemerintah maupun pihak ketiga untuk menangani konflik yang ada agar kondisinya tidak menjadi lebih buruk.
 - b. Langkah-langkah yang diambil oleh instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan distribusi SLT, baik dalam jangka pendek (sementara waktu) maupun jangka panjang.

- c. Penjelasan pemerintah ke pada masyarakat terhadap kegunaan dana Subsidi Langsung Tunai ini di berikan kepada masyarakat.

H. Metodologi Penelitian

Adalah sebuah pedoman yang berisi metode-metode ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam memecahkan permasalahan, menguji kebenaran serta menjaga obyektivitas penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dimana menurut David Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang peneliti atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴³

2. Unit Analisis

Istilah unit analisis diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti. Bertolak dari ujung penelitian ini, yaitu untuk mencari pola resolusi konflik yang demokrasi bagi konflik akibat ketidakmerataan distribusi SLT di Kulon Progo, maka dalam penelitian ini perlu ditentukan unit

⁴³ Lexy . J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal 6.

analisisnya. Adapun yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah mekanisme serta langkah-langkah kongkrit dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan konflik.

Sumber data yang hendak diperoleh dalam penelitian ini, sebagaimana metode kualitatif adalah kata-kata dan tindakan para elit dan anggota masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti perlu mencari informan dan responden yang dianggap mampu memberikan data/informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan berkaitan dengan topik penelitian. Informan berkaitan dengan pihak-pihak tertentu yang mengetahui secara spesifik mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan responden disini adalah merupakan wakil dari populasi yang akan diteliti.

Responden Penelitian:

1. Kepala BPS Kulon progo.
2. Tim Posko Layanan Pengaduan SLT PKPS BBM, Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
3. Koordinator Pembayaran SLT PT. Pos Indonesia Cabang Kulon Progo.

Selain itu juga diambil beberapa orang responden dari masyarakat sebagai perwakilan dari unsur penerima Subsidi Langsung Tunai agar terjadi keseimbangan data.

3. Sumber Data

a. Data Primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari responden, informal ataupun narasumber yang terpilih karena memiliki pengetahuan tentang informasi yang dibutuhkan dan mendalami situasi.

b. Data Sekunder

merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Lofland mengatakan bahwa sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁴

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, dapat dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder di dapat dari studi pustaka, dan lain-lain. Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini:

- a. Wawancara, adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud atau tujuan tertentu. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut

⁴⁴ *Ibid*, hal 157.

interviewee.⁴⁵ Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang tidak berstruktur. Wawancara dilakukan secara terbuka, informan ataupun responden mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan tahu maksud dari wawancara tersebut. Wawancara dilakukan dengan berdasar pada pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Posko Layanan Pengaduan SLT Bappeda, Kantor Pos Wates, serta responden atau penerima SLT di daerah kulon progo.

- b. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: 1). Sesuai dengan tujuan penelitian, 2). Direncanakan dan dicatat secara sistematis, 3). Dapat dikontrol keandalannya (*reliabilitasnya*) dan validitasnya.⁴⁶
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik simple random sampling untuk menentukan sampel. Dalam teknik ini random untuk mendapatkan sampel langsung dilakukan pada unit sampling

⁴⁵ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 1995, hal 57.

⁴⁶ *Ibid*, hal 54

sebagai unsur populasi yang terkecil, memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi.

Dalam survey tidaklah selalu perlu meneliti semua dalam populasi karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Agar penelitian dapat dilakukan dengan mudah maka perlu adanya penentuan sampel yang akan diambil agar mendapat data yang representatif. Ida Bagus Mantra dan Kasto berpendapat bahwa ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam hal itu :

1. Derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi. Makin seragam populasi itu makin kecil sampel yang dapat diambil
2. Presesi yang dikehendaki dari penelitian, makin tinggi presesi yang dikehendaki makin besar jumlah sampel yang diambil
3. tenaga, biaya dan waktu, semakin besar dana, tenaga dan waktu yang digunakan maka semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan sampel dan ini berarti tingkat presesi yang diperoleh semakin tinggi.⁴⁷

Sampel dalam penelitian ini adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terjadi konflik akibat dari ketidakmerataan distribusi subsidi langsung tunai program kompensasi pengurangan subsidi BBM di Kabupaten Kulon Progo.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang menurut Bogdan dan Biklen, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

⁴⁷ Ida Bagoes Mantra & Kasto, dalam Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta, 1995, hal 150-152.

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁸

Sedangkan menurut Ian Dey, analisa data kualitatif adalah analisa data yang memiliki inti analisa pada tiga proses yang berkaitan, yaitu: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan.⁴⁹

Di pihak lain, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- b. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

7. Lingkup Dan Daerah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara spesifik penelitian dilakukan di tiga instansi yang terkait dengan program SLT PKPS BBM, yaitu BPS Kulon Progo, Bappeda Kulon Progo (Posko Layanan Pengaduan SLT PKPS BBM Kulon Progo) dan Kantor Pos Wates Kota (Kulon Progo). Selain itu juga diambil beberapa orang masyarakat sebagai wakil dari unsur

⁴⁸ *Ibid*, hal 248.

⁴⁹ *Ibid*, hal 289.

⁵⁰ *Ibid*.

penerima SLT. Dari sumber data yang diperoleh, akan dikaji mengenai sejauhmana Konflik yang terjadi sebagai akibat dari ketidakmerataan distribusi Subsidi Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Kabupaten Kulon Progo, Serta bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas konflik yang terjadi.